

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Risk Management Committee di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2003, dimana dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya lagi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum adalah dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko ini adalah syarat yang harus dilengkapi selambat-lambatnya dibentuk oleh semua Perusahaan Finansial yang *Go Public* atau Bank Umum pada akhir 2007. Selanjutnya RMC diperbankkan disebut dengan Komite Pemantau Risiko.

Risiko dari segi finansial dan operasional selalu dihadapi oleh semua perusahaan tanpa terkecuali. Sistem manajemen risiko merupakan salah satu perangkat utama untuk mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin timbul. Sistem manajemen risiko yang efektif sendiri merupakan suatu kekuatan perusahaan yang membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, aspek pengawasan merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif (Andarini, 2010).

Dalam konteks manajemen risiko, dewan komisaris merupakan penanggung jawab pengawasan tertinggi di dalam perusahaan, oleh karena itu pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan juga menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Pada tahun 2009, *Securities & Exchange Commission* (SEC) Amerika mengajukan usulan agar perusahaan melakukan pengungkapan informasi yang lebih lengkap terkait dengan praktik pengawasan

manajemen risiko, termasuk sejauh mana peranan direksi dan dewan komisaris di dalam mengelola risiko.

Tahun 2014, pengawas keuangan Jepang berencana memberi hukuman kepada perusahaan teknologi Toshiba Corp, karena diduga memalsukan laporan keuangan. *Securities and Exchange Commission Surveillance* (SESC) berencana memberlakukan denda terhadap Toshiba karena melebih-lebihkan pendapatan perusahaan yang dilakukan para petinggi. Komite Independen mengatakan Toshiba membutuhkan perbaikan tata kelola perusahaan. Toshiba Corp memberikan pelajaran yang penting akan kesadaran risiko yang melekat pada strategi bisnis dan operasional perusahaan sehari-hari.

Risiko erat kaitannya dengan ketidakpastian, ini terjadi dikarenakan kurang atau tidak tersedianya informasi yang cukup atas apa yang akan terjadi. Ditengah ketidakpastian bisnis dan kompleksnya persaingan bisnis dan operasional perusahaan, manajemen risiko merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Manajemen risiko juga memberikan perlindungan kepada para pemangku jabatan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi karena adanya risiko.

Banyak tindakan yang diambil oleh para praktisi didalam manajemen risiko sebagai respon atas bermacam-macam risiko yang dihadapi. Dua macam tindakan yang dilakukan oleh responden pada manajemen risiko adalah mencegah atau memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko apabila ditemukan suatu risiko yang mungkin akan terjadi. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika risiko terjadi atau ketika risiko harus diambil. Penerapan manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa organisasi telah mengambil tindakan-tindakan yang tepat terhadap risiko yang akan mempengaruhinya. Kegagalan perusahaan sangat erat kaitannya apabila terdapat potensi risiko yang tidak tertangani dengan baik dan dianggap sebelah mata oleh perusahaan.

Sehingga timbul kesadaran manajemen untuk memilih langkah yang tepat, cermat dan akurat dalam mengelola risiko yang timbul dan dihadapi.

Manajemen risiko yang dirancang lebih spesifik dengan tujuan untuk lebih mengenali potensi risiko yang sangat mungkin terjadi karena kompleksitas didalam perusahaan menjadikan cukup beratnya tugas dari Dewan Komisaris. Maka Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang dapat membantu fungsi dewan komisaris agar berjalan lebih efektif (Setyarini , 2011). Komite – komite yang dibentuk seperti Komite Audit, Komite Nominasi, Komite Remunerasi, dan Komite Asuransi dan Risiko Usaha. Sangat mungkin komite pengawas manajemen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Manajemen Risiko ataupun Komite terkait tetapi dengan garis besar bahwa fungsi pengawasan utama masih berada pada kewenangan Dewan Komisaris dan Komite yang dibentuk bertujuan untuk memperingan fungsi kinerja Dewan Komisaris.

Penerapan *Good Corporate Governance* memerlukan peranan penting dari Komite Audit bagi suatu perusahaan dan ditegaskan dengan dikeluarkannya surat edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 yang diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-339/BEJ/07-2001 serta Surat Keputusan Meneg BUMN No. Kep-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 yang diubah dengan Surat Keputusan Meneg BUMN No. Kep-103/M-PBUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002. Dengan adanya regulasi yang jelas dari regulator (Pemerintah), seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia, baik finansial maupun *non-finansial* wajib memiliki Komite Audit.

Sesuai dengan peraturan dari Bapepam, Perusahaan *Go Public* di Indonesia diharuskan memiliki Komite Audit. Tetapi didalam peraturan yang telah ditetapkan regulator (Pemerintah) tidak terdapat peraturan yang mengatur bahwa perusahaan *Go Public* harus memiliki Komite Pengelola Risiko yang berdiri sendiri kecuali Perusahaan Finansial yang *Go Public*. Hal ini dikuatkan dalam

peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003 mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sehingga tidak ada kewajiban Perusahaan *Go Public non-Finansial* harus memiliki Manajemen risiko yang berdiri sendiri. (Krus dan Orowitz , 2009)

Berkaitan dengan manajemen risiko, implementasi manajemen risiko perusahaan masih tetap diberikan pada tugas-tugas komite audit. Sesuai yang ditetapkan oleh BAPEPAM bahwa tugas Komite Audit yang berkaitan dengan manajemen risiko yaitu melaporkan risiko–risiko yang terkait perusahaan kepada Dewan Komisaris dan melaporkan implementasi manajemen risiko yang dilakukan Dewan Direksi. Dengan tugas yang cukup dilematis, dikhawatirkan nantinya akan terjadinya *overlapping* fungsi. (Setyarini , 2011). Selain cukup beratnya tugas dari Komite Audit dan dikhawatirkannya terjadi informasi bias, muncul keraguan apakah Komite Audit mampu bekerja secara efektif dan optimal. Kemudian dilakukan suatu terobosan untuk membentuk sebuah komite terpisah yang melakukan pengawasan dan manajemen risiko perusahaan yang disebut *Risk Management Committee*.

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setyarini, 2011). Penelitian ini menggunakan karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan sebagai Variabel Independen dan *Risk Management Committee* (RMC) sebagai variabel dependen. Karakteristik Dewan Komisaris yang digunakan untuk mewakili penelitian ini adalah proporsi komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris. Karakteristik Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan (*Financial Reporting Risk*), Kompleksitas, *Leverage* dan *Profitabilitas*. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu *Pertama*, Tahun yang digunakan sebelumnya yaitu tahun 2008-2009. Sedangkan Pada penelitian ini, lebih spesifik menggunakan sampel Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun yang digunakan adalah tahun 2013-2015, *Kedua*, pada penelitian ini, Karakteristik Perusahaan yang digunakan menambah satu variabel

Independen Yaitu *Profitabilitas*, Penelitian menambahkan Variabel Profitabilitas karena tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan sangat erat kaitannya dengan besar kecilnya penggunaan aset perusahaan didalam menghasilkan laba sehingga *feedback* atas resiko yang dihadapi berbeda. Topik ini menarik dilakukan karena dengan berbagai macam karakteristik dewan komisaris dan karakteristik berbagai macam perusahaan menjadikan tata kelola setiap perusahaan memiliki keunikan tersendiri untuk membentuk suatu komite baru yang membantu didalam mencapai optimalisasi kinerja khususnya pengawasan dan pengelolaan risik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian yang sekaligus menjadi judul penelitian ini, yaitu: **“PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang diatas, efektivitas menjalankan sistem manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh pengawasan terhadap risiko itu sendiri. Bergabungnya komite manajemen risiko dengan komite audit di beberapa perusahaan menjadikan tugas komite audit menjadi semakin berat dan diragukan akan efektifitas dan efisiensinya didalam menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Maka daripada itu diperlukan RMC untuk menjalankan peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan secara lebih detail dan spesifik dikarenakan ancaman dan potensi yang disebabkan oleh risiko tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan menariknya hasil penelitian sebelumnya mengenai karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan yang berdampak terhadap strukturisasi RMC didalam *Annual Report* mendorong dilakukannya penelitian ini.

Dalam hal ini, dikaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan RMC?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan RMC ?
3. Apakah frekuensi rapat berpengaruh terhadap pengungkapan RMC?
4. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan RMC?
5. Apakah risiko pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan RMC?
6. Apakah Kompleksitas berpengaruh terhadap pengungkapan RMC ?
7. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan RMC?
8. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur RMC?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan RMC
2. Memberikan bukti secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan RMC
3. Memberikan bukti secara empiris pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan RMC
4. Memberikan bukti secara empiris pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan RMC
5. Memberikan bukti secara empiris pengaruh risiko pelaporan keuangan terhadap pengungkapan RMC
6. Memberikan bukti secara empiris pengaruh kompleksitas terhadap pengungkapan RMC
7. Memberikan bukti secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan RMC
8. Memberikan bukti secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan RMC

Adapun hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Pengembangan Ilmu pengetahuan
Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan RMC yang tepat bagi perusahaan finansial.
2. Bagi Perusahaan
Dapat mengetahui arti pentingnya penerapan manajemen risiko oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*.
3. Bagi Calon Investor
Dengan adanya kajian ini, diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor sebelum melakukan investasi dengan menelaah lebih jauh mengenai manajemen risiko yang telah dilakukan perusahaan.
4. Bagi penelitian yang akan datang
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan wacana untuk penyempurnaan penelitian sejenis dimasa akan mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai penjelasan dari latar belakang diambilnya judul skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan teori keagenan, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat, Reputasi Auditor, Risiko Pelaporan Keuangan,

Kompleksitas, Leverage, Profitabilitas serta *review* penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang objek penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, dan model analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai perhitungan data-data yang berhubungan dengan penelitian, pembahasan hasil pengolahan data, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai simpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPI